



Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera Melalui Program Keluarga Harapan

Ade Sulistiawati^{1*}, Syamsuddin RS.¹, Encep Taufik Rahman².

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email: adesulistn0906@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang masih belum terpetakan dengan baik yaitu berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis program yang digulirkan oleh Program Keluarga Harapan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan hasil pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu program pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui kegiatan pencairan dana bantuan sosial dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Selain itu, hasil dari pemberdayaan keluarga prasejahtera dapat ditinjau dari aspek kesehatan pada anak usia dini, aspek pendidikan, dan aspek kesejahteraan sosial pada lansia dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Keluarga Harapan, Kesejahteraan Keluarga.

ABSTRACT

The problems that are still not well mapped are related to poverty. Poverty experienced by the community affects the welfare of family life. The purpose of this study was to find out and analyze the program launched by the Family Hope Program, the process of implementing the Family Hope Program, and the results of empowering underprivileged families through the Family Hope Program in Bongas Kulon Village. This research is a qualitative research using descriptive method. The results of his research are the empowerment program for underprivileged families

through disbursement of social assistance funds and Family Capacity Building Meetings (P2K2). The implementation of the Family Hope Program goes through several stages, namely the preparation, implementation, evaluation and termination stages. In addition, the results of empowering underprivileged families can be viewed from health aspects in early childhood, educational aspects, and social welfare aspects for the elderly in accessing education and health facilities.

Keywords : *Social assistance; hope family; family welfare.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi baik dalam meningkatkan ekonomi sehingga terdapat peluang besar dalam mengembangkan aspek perekonomian untuk menurunkan angka kemiskinan (Prahesti dan Putri, 2018:142). Kemiskinan yang dirasakan masyarakat memiliki dampak pada kesejahteraan hidup keluarga. Kemiskinan yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sehingga mengalami kekurangan terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (Arfiani, 2019:5-6). Untuk membantu menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggulirkan Program Keluarga Harapan sebagai alternatifnya. Keberadaan Program Keluarga Harapan memberikan dampak terhadap taraf hidup masyarakat, sehingga mengalami peningkatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, maka terdapat bantuan yang disalurkan kepada keluarga prasejahtera sebagai keluarga yang mendapatkan manfaat (Kementerian Sosial, 2021).

Program Keluarga Harapan merupakan program yang berasal dari pemerintah dengan tujuan meringankan keluarga miskin agar sejahtera sehingga jumlah masyarakat miski di Indonesia berkurang. Hal tersebut terbukti bahwa presentasi masyarakat miskin pada Bulan Maret 2016 sebesar 10,86% dari jumlah penduduk 28,01 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2016). Pemerintah memiliki target pada tahun 2019 dalam menurunkan angka kemiskinan sebanyak 7-8%, selaras dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015- 2019 (Kementerian Sosial, 2021).

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk menekan jumlah masyarakat miskin yang meningkat di Indonesia melalui akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dengan akses tersebut maka pendapatan keluarga penerima manfaat akan bertambah dan beban pengeluaran dapat berkurang. Selain itu, sebagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan penduduk serta edukasi kepada keluarga penerima manfaat agar terciptanya keluarga yang mandiri. Oleh sebab itu, dalam upaya memandirikan masyarakat perekonomian rendah harus dioptimalkan oleh Program Keluarga Harapan agar angka kemiskinan dapat berkurang dan tercapainya tujuan masyarakat mandiri serta sejahtera.

Penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem perbankan secara non tunai. Keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai akses untuk transaksi non tunai, kartu tersebut sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan agar mendapatkan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang terhubung dengan rekening tabungan. Nomor rekening tabungan akan diperoleh setiap keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan dalam mengakses jasa keuangan (*financial inclusion*). Untuk sistem penarikan dana bantuan dilakukan secara berjenjang yaitu dalam periode satu tahun terdapat empat kali penarikan dengan tujuan mengedukasi keluarga yang mendapatkan manfaat untuk menabung dan manajemen keuangan dengan baik. Dipandang dari perspektif negatif, jika dana bantuan Program Keluarga Harapan tidak dialokasikan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat maka kehidupan tetap statis dalam kemiskinan karena tidak dimaksimalkan untuk memberdayakan keluarga.

Parameter keberhasilan Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon yaitu: *pertama*, komunikasi yang terjalin antara keluarga penerima manfaat dengan pendamping sosial efektif; dan *kedua*, hubungan antara pendamping serta stakeholder desa yang terjalin baik. Sehingga adanya keterbukaan untuk memberdayakan keluarga prasejahtera dan penyaluran bantuan diberikan secara adil kepada keluarga yang berada dalam garis kemiskinan di Desa Bongas Kulon.

Terdapat kategori dalam Program Keluarga Harapan yaitu anak usia dini, anak dengan jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas, disabilitas berat, ibu hamil, dan lansia. Dengan kategori tersebut, keberadaan Program Keluarga Harapan dalam memberdayakan masyarakat memiliki dampak yang dirasakan oleh keluarga prasejahtera di Desa Bongas Kulon. Terdapat 196 keluarga penerima manfaat dengan kategori anak usia dini, anak yang menempuh pendidikan disebut fasilitas layanan pendidikan (fasdik), dan fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang dirasakan manfaatnya oleh lansia. Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan, baik kesehatan balita maupun kesehatan lansia.

Fokus penelitian dari latar belakang tersebut yaitu berkaitan dengan program yang digulirkan oleh Program Keluarga Harapan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan hasil pemberdayaan keluarga prasejahtera yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon. Sehingga fokus penelitian jika dirumuskan berdasarkan kalimat tanya yaitu: apa program yang digulirkan oleh Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon dalam memberdayakan keluarga prasejahtera?, bagaimana proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon dalam memberdayakan keluarga prasejahtera?, dan bagaimana hasil pemberdayaan keluarga prasejahtera yang

dilakukan oleh Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon?.

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan yaitu oleh Horunni'mati (2020) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Ekonomi, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lubis (2021) berjudul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan), dan penelitian oleh Permana, et al., (2018) dengan judul penelitian yaitu Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang (Studi Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Penelitian yang relevan tersebut tentang pemberdayaan melalui Program Keluarga Harapan menerapkan metode kualitatif dengan studi deskriptif. Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat peningkatan hidup keluarga karena adanya kemudahan masyarakat yang memperoleh bantuan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup keluarga penerima manfaat. Namun, jika ditinjau dari perbedaannya yaitu tidak terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam keberlangsungan Program Keluarga Harapan yang diimplementasikan, tidak tercantum tinjauan hunian keluarga penerima manfaat serta fasilitas kekayaan yang dimiliki. Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu berkaitan dengan keberlangsungan Program Keluarga Harapan dalam memberdayakan keluarga prasejahtera yang ditinjau dari program, proses pelaksanaan dan dampak yang dirasakan oleh keluarga yang mendapatkan bantuan.

Landasan pemikiran dalam penelitian ini yaitu menerapkan teori pemberdayaan. Selain itu, dilengkapi dengan landasan konseptual tentang teori pemberdayaan keluarga, teori keluarga prasejahtera, dan teori tentang Program Keluarga Harapan.

Penelitian pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, pendekatan fenomenologi, dan paradigma interpretif karena relevan dengan fokus kajian yang berkaitan dengan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan terhadap keluarga penerima manfaat berdasarkan program yang telah disusun

LANDASAN TEORITIS

Teori yang sesuai dengan penelitian tentang pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan yaitu teori yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, keluarga prasejahtera dan Program Keluarga Harapan. Teori tersebut relevan dengan judul penelitian tentang pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan terkait proses pemberdayaan.

Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris “empowerment”. Merriam Webster pada Oxford English Dictionary (Roesmidi & Risyanti., 2006:3), pemberdayaan memiliki dua makna yaitu memberikan kemampuan serta kekuasaan. Makna lain tentang pemberdayaan sebagai usaha untuk membina pengetahuan serta keterampilan masyarakat lemah agar memiliki daya untuk mandiri dalam melangsungkan hidup dengan mengembangkan kualitas masyarakat untuk memutuskan masa depan (Anwas, 2015:50). Disamping itu, pemberdayaan keluarga juga sebagai suatu sistem sosial untuk mengetahui, memahami dan mengembangkan keterampilan masyarakat agar dapat menyelaikan masalah yang terjadi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi penentu dan pelaku pembangunan yang memberikan peluang untuk masyarakat dalam menganalisis tantangan pembangunan serta mengusulkan tindakan yang disusun untuk menyelesaikan problematika (Ulfa et al., 2017:63). Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga memiliki tiga komponen penting, diantaranya yaitu (Dunst et al., 1994 dalam Ardian, 2014:7): (1) Setiap keluarga memiliki dan dapat mendirikan kekuatan; (2) Rintangan keluarga dalam mencukupi kebutuhan disebabkan aspek dukungan keluarga yang tidak memberikan kesempatan untuk melampauinya; dan (3) Dalam usaha memberdayakan keluarga, anggota keluarga berusaha untuk terampil dan berlomba-lomba agar terjadinya perubahan. Selain itu, pemberdayaan keluarga juga memiliki tujuan yaitu: (1) Meringankan keluarga untuk dapat mengatasi dan membantu proses transformasi yang dilakukan; (2) Membentuk kebiasaan agar terciptanya perubahan untuk dapat melaksanakan keberhasilan hidup tanpa adanya hambatan dan kesulitan; (3) Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan hidup semua anggota keluarga selama rangkaian perkembangan dan siklus hidup; (4) Menekuni kemampuan yang masih tersembunyi dari setiap anggota keluarga seperti karakter, manajerial serta kepemimpinan; dan (5) Membimbing serta menemani rangkaian proses perubahan sampai pada tahap mandiri dan tujuan tercapai (Sunarti, 2008 dalam Ardian, 2014:7-8).

Prinsip pemberdayaan memandang keluarga dapat melindungi setiap anggota keluarga lainnya terutama yang sakit dan terdapat bimbingan tenaga kesehatan. Pemberdayaan keluarga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu: (1) Dalam memberdayakan keluarga tidak memberikan bantuan atau bimbingan dalam bentuk amal karena berdampak ketergantungan dan masyarakat akan tetap berada dalam keadaan lemah. Seyogianya bantuan yang didapatkan oleh keluarga berupa pengembangan kemampuan keluarga berupa pendampingan dan pelatihan; (2) Megimplementasikan metode pemberdayaan yang menjadikan keluarga kuat melalui pelatihan keahlian untuk berjuang menghadapi masalah; (3) Meningkatkan

partisipasi yang berdampak pada keluarga untuk meningkatkan kapasitas, totalitas terhadap kegiatan serta menentukan keputusan penuh (Ardian, 2014:9-10).

Dalam memberdayakan masyarakat dalam ruang lingkup keluarga harus mengaplikasikan beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan, mempersiapkan petugas (*community worker*) sebagai pekerja sosial dan lapangan agar berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan dalam memberdayakan; (2) Pengkajian, petugas dapat mengidentifikasi dan mengetahui problematika yang diperlukan masyarakat sesuai sumber daya manusia yang terdapat di lapangan sehingga program yang diluncurkan sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat; (3) Perencanaan alternatif, menyertakan masyarakat dengan masalah yang terjadi serta bersama menemukan solusi atas problematika tersebut; (4) Pemformalisasi rencana aksi, kelompok yang dibentuk sebelumnya menetapkan program yang diluncurkan untuk mengatasi problematika masyarakat dan dibantu petugas lapangan; (5) Implementasi, masyarakat sebagai subjek pemberdaya dapat mengatur program yang berlangsung agar tetap berjalan dan petugas lapangan beserta masyarakat harus kerjasama sesuai dengan susunan; (6) Evaluasi, akan diketahui tingkat keberhasilan dan kendala program sebagai cara mengantisipasi keberlangsungannya; dan (7) Terminasi, yaitu tahap untuk mengakhiri hubungan objek pemberdayaan secara formal (Soekanto, 1987:63 dalam Maryani et al., 2019:13-14).

Keluarga prasejahtera atau miskin merupakan tidak tercukupinya kebutuhan dasar dalam keluarga walaupun hanya minimal seperti kebutuhan rohani, kesehatan serta pangan. Terdapat beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok lemah (kurang berdaya), yaitu seperti (Suharto, 2010:60): (1) Lemah secara struktural, merupakan lemah ditinjau dari kelas sosial yang memiliki perekonomian rendah, kelompok minoritas, sehingga seringkali mendapatkan diskriminasi dan perlakuan kurang adil; (2) Lemah secara khusus, contohnya seperti anak berkebutuhan khusus, gay dan lesbian, serta masyarakat yang sosialisasinya tidak sempurna; dan (3) Lemah secara personal, kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki problematika pribadi baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Keluarga prasejahtera dapat dikelompokkan keluarga yang memperoleh bantuan akses dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan raskin. Kondisi keluarga yang memiliki pendapatan tetapi kurang mencukupi kebutuhan hidup dengan rentang waktu lama sehingga dampaknya pada kesehatan dan pangan dapat pula dikatakan sebagai keluarga miskin. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada kesejahteraan hidup sehari-hari yang masih tetap berada dalam kekurangan.

Program Keluarga Harapan atau *Conditional Cash Transfers* (CCT) merupakan salah satu program di Indonesia yang memberikan bantuan dengan tujuan sebagai

upaya perlindungan sosial. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan secara cepat agar dapat memutus angka kemiskinan antar generasi yang terjadi semakin banyak di Indonesia (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021:7).

Program Keluarga Harapan dapat diakses oleh keluarga yang memiliki perekonomian rendah dengan syarat keluarga harus memiliki kategori tertentu seperti ibu hamil, anak usia dini yang membutuhkan fasilitas kesehatan (faskes), anak sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) agar dapat menggunakan fasilitas pendidikan, serta disabilitas dan lanjut usia dalam rangka mempertahankan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk membantu keluarga prasejahtera dalam meningkatkan pendapatan dalam bentuk pembayaran tunai secara langsung. Setiap keluarga yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif adanya kendala ekonomi disebabkan oleh perubahan kebijakan dan gerakan ekonomi. Sehingga Program Keluarga Harapan dapat bermanfaat dalam menjaga (mengelola) taraf hidup masing-masing rumah tangga agar berkurangnya dampak tekanan sosial.

Inti dari tujuan Program Keluarga Harapan adalah membantu keluarga prasejahtera dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021: 22): (1) Memenuhi standar hidup keluarga prasejahtera melalui fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan untuk kebutuhan konsumsi keluarga; (2) Mengurangi tanggungan pengeluaran dan menambah pendapatan keluarga prasejahtera; (3) Membentuk kemandirian keluarga prasejahtera dalam mengakses berbagai fasilitas yang didapatkan; dan (4) Menurunkan angka kemiskinan antargenerasi.

Kriteria keluarga yang mendapatkan bantuan yaitu: (1) Komponen kesehatan didapatkan bagi ibu hamil, nifas, dan menyusui dengan catatan ada batasan dalam mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan yaitu hanya sampai kehamilan kedua yang berhak mendapatkan bantuan. Selain itu, anak usia dini yang terhitung dari anak dalam berusia 0 tahun sampai anak tersebut belum menempuh jenjang pendidikan, atau kisaran usia 6 tahun; (2) Pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas atau anak dengan jenjang usia 6-21 tahun; dan (3) Komponen kesejahteraan sosial untuk lansia minimal umur 70 tahun (keadaan usia sudah tidak mampu untuk bekerja) dan disabilitas yang sudah tidak dapat beraktivitas sehari-hari serta tidak mampu hidup sendiri atau bergantung terhadap orang lain ketika membutuhkan sesuatu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak geografis Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka berada di garis bujur 108° 19' 31,62" T dan terletak di garis lintang 60 42' 16,06" S. Ditinjau dari segi topografinya, Desa Bongas Kulon adalah desa yang letaknya berada di dataran rendah dengan ketinggian \pm 25 meter dari permukaan air laut (mdpl). Adapun batas wilayah Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka yaitu bagian utara Desa Pancaksuji, bagian timur Desa Bongas Wetan, bagian Selatan Desa Sumberjaya, dan bagian barat Desa Majasuka. Sedangkan luas wilayah Desa Bongas Kulon 240,808 Ha yang dijasikan sebagai lahan pertanian 165,338 Ha, permukiman 72,20 Ha, perkebunan 1,40 Ha, tanah lapang 1,00 Ha, dan lahan kantor pemerintah 0,87 Ha.

Program dari Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon

Usaha dalam memandirikan masyarakat dapat dilaksanakan dengan banyak cara. Salah satu cara yang diimplementasikan yaitu dengan bimbingan dan pembinaan agar timbul kemandirian pada masyarakat. Hal tersebut selaras dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Anwas bahwa pemberdayaan adalah usaha untuk membina pengetahuan serta keterampilan masyarakat lemah agar memiliki daya untuk mandiri dalam melangsungkan hidup dengan mengembangkan kualitas masyarakat untuk memutuskan masa depan (Anwas, 2015:50).

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) adalah hak yang dimiliki oleh peserta Program Keluarga Harapan sejak tahun pertama. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) wajib diikuti oleh keluarga yang mendapatkan manfaat agar dapat meningkatkan pengetahuan sehingga problematika hidup yang dihadapi dapat terselesaikan. Keberlangsungan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) diadakan satu bulan sekali. Kegiatan ini memberikan pembelajaran kepada keluarga penerima manfaat agar memiliki pengetahuan tentang urgensi dari pendidikan yang ditempuh oleh anak, manajemen keuangan keluarga, peningkatan pengetahuan kesehatan, penyandang disabilitas, pola pengasuhan anak serta pemahaman tentang lansia. Aktivitas pendamping sosial tidak hanya pemutakhiran data tetapi juga memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat agar memiliki kemampuan dan wawasan dalam mengatur hidupnya melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dengan aktivitas tersebut, maka akan adanya komunikasi yang erjalin antara pendamping Program Keluarga Harapan dengan yang mendapatkan manfaat. Pesan dalam komunikasi tersebut harus sampai pada keluarga yang mendapatkan manfaat sehingga dalam penyampaian komunikasi bersifat umum. Menyampaikan pesan komunikasi bersifat harus umum, baik informasi yang disampaikan ilmiah maupun non-ilmiah (Mubasyaroh, 2017:313).

Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) mengacu pada modul sebagai rujukan pendamping sosial dalam memberdayakan keluarga prasejahtera di Desa Bongas Kulon agar masyarakat yang mendapatkan bantuan dapat meningkatkan pengetahuan untuk kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan teori tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan pengetahuan setiap anggota keluarga pada saat proses pemberdayaan dan siklus hidup (Sunarti, 2008 dalam Ardian, 2014:7-8). Modul tersebut diantaranya berjudul Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha, Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Modul Kesejahteraan Sosial Disabilitas dan Lansia, Modul Perlindungan Anak, dan Modul Kesehatan dan Gizi. Dengan adanya modul sebagai pendukung kegiatan, maka diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ekonomi lemah agar kehidupannya sejahtera. Selain itu, dengan adanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga diharapkan dapat mengembangkan pemahaman keluarga yang mendapatkan bantuan agar sadar akan berbagai aspek seperti melindungi anak, pola asuh dan mendidik anak, manajemen keuangan dan perencanaan untuk memiliki usaha, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan pada lansia dan penyandang disabilitas.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Desa Bongas Kulon diselenggarakan di ruang pertemuan aula kelurahan, rumah peserta, sekolah, dan lainnya sesuai dengan kesepakatan keluarga penerima manfaat. Seluruh keluarga penerima manfaat wajib berpartisipasi dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Saat pertemuan, keluarga penerima manfaat yang hadir dibagi kelompok terdiri dari 15-30 orang agar pelaksanaannya optimal. Media yang dipakai dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Bongas Kulon yaitu poster, buku pintar, brosur, flipchart, film, dan media yang menunjang untuk anak-anak. Hal tersebut berdasarkan teori tujuan bantuan sosial yaitu untuk meringankan beban pengeluaran keluarga prasejahtera agar kebutuhan hidupnya tercukupi serta individu yang mendapatkan bantuan dapat berkembang (Sarpono, 2020:20).

Bantuan sosial adalah bantuan yang diterima oleh masyarakat yang memiliki perekonomian rendah. Pencairan dana tunai dilakukan oleh Program Keluarga Harapan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya bantuan sosial maka mengantisipasi terjadinya resiko sosial pada masyarakat agar dapat menjaga keberadaan sebagai manusia.

Pencairan dana oleh Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon yaitu berupa uang. Berdasarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia, bentuk bantuan sosial dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan perekonomian rentan. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Hoesada (2021:635) bahwa bentuk lain dari bantuan sosial dapat berupa

hunian sementara, layanan kesehatan, sandang, makanan pokok, dana tunai, obat-obatan, pendidikan, bimbingan teknis, dan belanja jasa profesional. Di Desa Bongas Kulon pemberian bantuan ini diberikan kepada keluarga prasejahtera yang memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan.

Tahap pencairan dana dilakukan dalam satu tahun empat kali. Pada tahap pertama yaitu Bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Bantuan yang diperoleh keluarga penerima manfaat yang memiliki ketentuan yaitu: (a) Bantuan tetap diperoleh per tahun; (b) Bantuan yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat maksimal tiga kategori dalam ketentuan yang sudah berlaku sebagai barometer peserta Program Keluarga Harapan; (c) Jika terdapat lebih dari tiga kategori yang mendapatkan bantuan sebagai peserta Program Keluarga Harapan dalam satu keluarga, maka nominal bantuan yang didapatkan diambil terbesar; dan (d) Maksimal kehamilan sampai masa hamil kedua, jika lebih dari dua maka tidak akan memperoleh bantuan walaupun memenuhi kriteria.

Proses pencairan dana yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat dilakukan dengan memindahkan buku dana yang berasal dari rekening pemberi bantuan sosial di bank penyalur kepada penerima bantuan sosial. Hal tersebut berdasarkan pada peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai pada tanggal 12 Juli 2017 pasal 8 ayat 2.

Bantuan dana yang didapatkan keluarga penerima manfaat digunakan sesuai dengan kategori yang diperoleh, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lansia serta penyandang disabilitas. Jika penggunaan dana yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, maka dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang dapat menunjang terpenuhinya kehidupan sehari-hari. Hal tersebut relevan berdasarkan teori alokasi dana bantuan sosial, bahwa pendamping memberikan kebebasan kepada keluarga yang mendapatkan manfaat untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan sehari-hari (Hidayatulloh et al., 2020:209).

Prioritas utama penggunaan dana bantuan tetap harus berdasarkan kategori yang didapatkan. Komponen layanan pendidikan harus digunakan untuk mengakses pendidikan dengan baik. Hal tersebut berlaku juga untuk seluruh komponen yang terdapat pada Program Keluarga Harapan. Agar beban pengeluaran keluarga prasejahtera mengalami keringanan dan sejahtera dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan.

Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon dilakukan berdasarkan tahap pemberdayaan masyarakat. Tahap pemberdayaan masyarakat

dibimbing oleh pendamping sosial mulai dari tahapan awal sampai masyarakat dapat mandiri dan berdaya untuk menjalankan hidupnya. Tahap yang diterapkan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Hal tersebut relevan dengan teori tahap pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif, pemformasian rencana aksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi (Soekanto, 1987:63 dalam Maryani dan Nainggolan, 2019:13-14).

Tahap persiapan berkaitan dengan tahap awal melakukan pemberdayaan menyangkut tenaga Sumber Daya Manusia. Dalam tahap ini, adanya perencanaan implementasi. Tahap perencanaan dilakukan untuk memastikan tempat pemberdayaan dan banyaknya calon keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan. Tempat dan jumlah keluarga penerima manfaat ditentukan berdasarkan data yang sudah tertera di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data dari Dinas Sosial. Selain itu, dalam tahap persiapan dapat diadakannya perkenalan antara pemberdaya dengan *stakeholder* setempat agar proses pemberdayaan dapat dilakukan secara partisipatif (Handono et al., 2020:117).

Pada tahun sebelumnya, data calon keluarga penerima manfaat di Desa Bongas Kuon berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendamping sosial dengan mengumpulkan beberapa syarat seperti *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* kartu ATM, *fotocopy* Kartu Indonesia Sehat (KIS), *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan *fotocopy* Kartu Indonesia Pintar (KIP). Setelah data tersebut terkumpul, maka dilakukannya pertemuan awal dan validasi data. Namun, pada saat ini mengalami perubahan karena data penerima manfaat sudah tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga pendamping sosial Desa Bongas Kulon bertugas untuk membina tahap-tahap selanjutnya.

Pada pertemuan awal pendamping sosial melakukan sosialisasi kepada calon keluarga penerima manfaat. Tujuan sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada calon keluarga yang mendapatkan manfaat tentang Program Keluarga Harapan berkaitan tujuan, prosedur, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat, dan jadwal pencairan Program Keluarga Harapan. Sosialisasi dilakukan kepada keluarga penerima manfaat yang baru mendapatkan bantuan sosial. Tetapi bagi penerima manfaat yang sudah lama mendapatkan bantuan maka dilanjutkan pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan pembinaan saat pencairan dana bantuan sosial.

Pada tahap implementasi, masyarakat memiliki peran utama untuk mempertahankan kelangsungan program. Petugas atau pendamping bekerjasama dengan masyarakat agar penerima manfaat dapat mengerti tentang tujuan, sasaran, dan maksud secara jelas agar rencana yang sudah disusun dengan teliti dan baik

tidak melenceng saat pelaksanaan di lokasi pemberdayaan (Sudarmanto et al., 2020:201). Maka dari itu, sosialisasi dan komunikasi penting dilakukan supaya meminimalisir kendala yang terjadi.

Tahap implementasi berkaitan dengan program yang digulirkan sebelumnya yaitu penyaluran bantuan sosial. Bentuk bantuan sosial di Desa Bongas Kulon berupa uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Pemberian bantuan sosial disalurkan kepada keluarga miskin dengan perekonomian rentan supaya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan itu, tanggungan masyarakat miskin dapat terbantu serta masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas pemerintah.

Bantuan sosial berbentuk uang yang diterima keluarga penerima manfaat sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Pemberian bantuan sosial disalurkan kepada keluarga miskin dengan perekonomian rentan supaya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan itu, beban pengeluaran masyarakat prasejahtera dapat terbantu dan masyarakat pun dapat mengakses berbagai fasilitas pemerintah.

Bantuan sosial berbentuk uang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah menjadi peserta Program Keluarga Harapan. Pemberian bantuan sosial disalurkan kepada keluarga miskin dengan perekonomian rentan supaya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan itu, beban pengeluaran masyarakat miskin dapat terbantu dan masyarakat pun dapat mengakses berbagai fasilitas pemerintah.

Penyaluran bantuan dilakukan selama empat kali dalam setahun. Hal tersebut sesuai dengan tahap yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tahap pertama dilakukan pada Bulan Januari; tahap kedua dilakukan pada Bulan April; tahap ketiga dilakukan pada Bulan Juli; dan tahap keempat dilakukan pada Bulan Oktober.

Penyaluran bantuan sosial didistribusikan melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) dari setiap anggota keluarga penerima bantuan. Sehingga hal tersebut termasuk sebagai bukti keanggotaan Program Keluarga Harapan. Dari *Automatic Teller Machine* (ATM) yang didapatkan maka penyaluran uang tunai secara otomatis sudah tersalurkan kepada penerima manfaat yang memiliki kartu aktif. Jumlah penerima bantuan setiap komponen berbeda-beda, sesuai dengan kategori yang didapatkan oleh keluarga prasejahtera sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Rincian jumlahnya yang diterima oleh setiap komponen yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Indeks Bantuan Yang Diterima Oleh Setiap Keluarga

| Kategori | Indeks Tahunan | Indeks Tiga Bulan |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Ibu hamil | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 |
| Balita 0-6 tahun | Rp. 3.000.000 | Rp. 750.000 |
| Jenjang sekolah dasar | Rp. 900.000 | Rp. 225.000 |
| Jenjang sekolah menengah pertama | Rp. 1.500.000 | Rp. 375.000 |
| Jenjang sekolah menengah akhir | Rp. 2.000.000 | Rp. 500.000 |
| Disabilitas berat | Rp. 2.400.000 | Rp. 600.000 |
| Lanjut usia (60 tahun) | Rp. 2.400.000 | Rp. 600.000 |

Sumber: Hasil wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon

Bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat didapatkan dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Tujuannya yaitu memberikan edukasi kepada keluarga yang mendapatkan bantuan agar dapat mengelola uang dengan baik dan memberikan edukasi untuk rajin menabung sehingga hal tersebut dapat membentuk kebiasaan baru dan adanya perubahan dalam masyarakat (Sunarti, 2008 dalam Ardian, 2014:7-8). Alur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan disesuaikan dengan pedoman yang berlaku dalam kebijakan program secara general. Tujuannya agar saat penyaluran terkoordinasi dengan baik antara pendamping Program Keluarga Harapan dengan penerima bantuan. Oleh karena itu, alur penyaluran bantuan di Desa Bongas Kulon yaitu dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan yaitu memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat, distribusi atau penyaluran bantuan sosial harus adanya konfirmasi data rekening kepada bank penyalur melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan pencairan bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat serta harus melaksanakan penarikan bantuan pada tahap pencairan di agen bank atau ATM terdekat dengan lokasi pemberdayaan yaitu di Desa Bongas Kulon.

Selain itu, tahap implementasi program berkaitan dengan pendampingan yang diterapkan pertama kali pada tahun 2014. Pendampingan adalah edukasi yang diberikan pendamping sosial kepada keluarga penerima manfaat. Bentuk pendampingan yang dilakukan Program Keluarga Harapan yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Tujuan dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah terjadinya perubahan perilaku dan

kemandirian keluarga yang mendapatkan bantuan.

Lokasi Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) harus strategis dengan keluarga penerima manfaat. Hal tersebut agar dapat dijangkau oleh pihak yang hadir dalam kegiatan. Tempat pelaksanaan juga dapat menampung banyaknya keluarga penerima manfaat yang berpartisipasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan di fasilitas umum seperti aula, rumah peserta, sekolah, masjid dan lainnya. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Desa Bongas Kulon menggunakan fasilitas masjid sebagai tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh keluarga penerima manfaat.

Waktu pelaksanaan diadakan satu kali dalam sebulan. Dalam satu kali pertemuan pendamping sosial menjelaskan sesi yang terdapat di modul acuan pelaksana Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) berdasarkan kebutuhan dan aspirasi keluarga penerima manfaat. Jadi, waktu pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) fleksibel berdasarkan persetujuan peserta dan pendamping sosial Program Keluarga Harapan.

Tahap evaluasi merupakan tahap pemantauan pendamping terhadap peserta Program Keluarga Harapan dengan melibatkan beberapa *stakeholder* tertentu (Soekanto, 1987:63 dalam Hanafi, 2018:19). Tahap evaluasi Program Keluarga Harapan terhadap keluarga penerima manfaat di Desa Bongas Kulon yaitu berkaitan dengan verifikasi komitmen sebagai peserta yang mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Verifikasi sebagai usaha untuk memperbaharui data keluarga penerima manfaat yang berstatus peserta Program Keluarga Harapan. Cakupan verifikasi komitmen yaitu konsep verifikasi (pengertian, kewajiban dan hak, ketentuan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan), ketentuan proses verifikasi (pelaksanaan verifikasi dan pelaksanaan pengecualian verifikasi), sanksi dan perhitungan verifikasi (sanksi dan perhitungan komitmen yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang tidak melaksanakan komitmen menjadi peserta Program Keluarga Manfaat).

Program Keluarga Harapan sebagai bentuk bantuan bersyarat, mewajibkan keluarga penerima manfaat untuk memenuhi layanan akses kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Sehingga setiap keluarga penerima manfaat yang berstatus sebagai peserta Program Keluarga Harapan dipastikan terdaftar dan berpartisipasi pada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Verifikasi komitmen dimaksud untuk mengawasi partisipasi keluarga penerima manfaat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan secara berkala. Sehingga dalam pelaksanaan terdapat formulir verifikasi yang diberikan oleh pendamping kepada petugas layanan pendidikan dan kesehatan untuk mencatat data keluarga penerima manfaat yang setiap bulannya tidak hadir. Yang mengisi

formulir tersebut adalah petugas fasilitas pendidikan dan kesehatan lalu diinput melalui aplikasi SIM Program Keluarga Harapan. Hasil dari formulir verifikasi komitmen tersebut sebagai pertimbangan dalam penangguhan, pendistribusian, dan pengakhiran bantuan.

Tahap terminasi berkaitan dengan tahap transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan atau pemutusan kepesertaan dalam proses pemberdayaan (Adi, 2019 dalam Yulivan, 2021:30). Peserta Program Keluarga Harapan yang mendapatkan bantuan selama enam tahun harapannya mengalami perubahan perilaku dan kemandirian. Perubahan perilaku dan kemandirian tersebut dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan status sosial ekonomi yang mengalami perkembangan peningkatan. Tahap transformasi kepesertaan menjadi tahap akhir dalam pemberdayaan Program Keluarga Harapan sebagai keluarga penerima manfaat melalui resertifikasi.

Kegiatan resertifikasi yaitu kegiatan mendata ulang dan evaluasi status ekonomi serta sosial keluarga penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dalam waktu enam tahun. Tahun kelima hampir selesai menjadi peserta Program Keluarga Harapan, maka resertifikasi akan dilakukan. Hasil resertifikasi menjadi hasil penentuan status akhir menjadi peserta Program Keluarga Harapan dengan dilakukannya transisi atau graduasi.

Graduasi yang dilakukan oleh pendamping sosial Desa Bongas Kulon memiliki target tiap tahunnya. Target graduasi keluarga penerima manfaat sebesar 10% karena setiap tahun jumlah keluarga penerima manfaat mengalami peningkatan. Graduasi atau transisi kepesertaan Program Keluarga Harapan memiliki dua jenis yaitu graduasi alamiah dan graduasi secara mandiri. Graduasi alamiah adalah graduasi yang terjadi karena peserta Program Keluarga Harapan tidak memiliki komponen sehingga hal tersebut harus diakhiri masa kepesertaan Program Keluarga Harapan. Sedangkan graduasi mandiri adalah graduasi yang dilakukan karena peserta Program Keluarga Harapan sudah mengalami perubahan perilaku dan mandiri.

Hasil Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera

Hasil pemberdayaan dapat ditinjau berdasarkan tercapainya tujuan. Tujuan pemberdayaan keluarga yaitu menolong keluarga agar mampu beradaptasi dalam menjalankan hidup tanpa adanya kesulitan. Hal tersebut berdasarkan teori tujuan pemberdayaan menurut Sunarti (Ardian, 2014:7-8). Hasil dari pemberdayaan melalui Program Keluarga Harapan bagi keluarga prasejahtera di Desa Bongas Kulon memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dilihat berdasarkan dari berbagai kategori yang didapatkan oleh penerima manfaat.

Inti dari hasil pemberdayaan yang dilakukan yaitu untuk memperbaiki

masyarakat ditinjau dari banyak aspek kehidupan (Mardikanto dan Poerwoko, 2012:111-112). Usaha untuk memperbaiki dimaksud utamanya bagi masyarakat yang memiliki kesejahteraan rata-rata bawah yang memiliki banyak tanggungan kehidupan namun pendapatan masih belum mencukupi kebutuhannya. Sehingga hal tersebut masyarakat dikategorikan sebagai masyarakat prasejahtera.

Aspek kesehatan merupakan aspek yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Pembangunan kesehatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sangat utama diimplementasikan. Pembangunan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai macam edukasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Melalui bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon menjadi bentuk peningkatan pengetahuan keluarga prasejahtera. Hal tersebut relevan dengan teori strategi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, bahwa strategi yang dapat diimplementasikan yaitu menggerakkan masyarakat akan kesadaran terhadap kesehatan (Rachmat, 2018:3). Hal tersebut ditinjau dengan adanya edukasi pada saat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Kegiatan dalam menjaga dan mengembangkan tingkat kesehatan masyarakat dengan upaya mencegah penyakit yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Upaya pencegahan penyakit dapat diatur dengan berkolaborasi dari berbagai sektor dan program. Salah satu program yang digulirkan oleh pemerintah dalam membantu mengembangkan kesehatan keluarga prasejahtera yaitu Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon.

Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon memiliki andil dalam mengembangkan kesehatan masyarakat rentan. Partisipasi yang dijalankan Program Keluarga Harapan dengan memberikan bantuan sosial kepada anak usia dini berusia 0-6 tahun dalam mencukupi kebutuhan gizi. Jika gizi anak usia dini tidak tercukupi akan berdampak pada kondisi kesehatan menjadi buruk, anak menjadi mudah terkena penyakit dan pertumbuhannya lambat.

Bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan untuk komponen kesehatan didistribusikan kepada anak usia dini dan ibu hamil. Namun, di Desa Bongas Kulon komponen kesehatan berlaku untuk anak usia dini karena tidak terdapat ibu hamil yang mendapatkan bantuan. Hal tersebut berdasarkan data buku induk Desa Bongas Kulon bahwa yang mendapatkan kategori anak usia dini terdapat 11 jiwa.

Dana bantuan yang diterima fasilitas kesehatan anak usia dini yaitu dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, pengobatan kesehatan dan juga media penunjang untuk bermain anak serta terdapat penerima manfaat yang menggunakan dananya untuk membangun usaha kecil-kecilan di rumah. Pengalokasian bantuan yang diperoleh anak usia dini di Desa Bongas Kulon dapat

digunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak. Sehingga kesehatan dan nutrisi dapat tercukupi, mengalami perkembangan dan adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan untuk balita. Selain itu, dengan dilaksanakannya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) oleh pendamping sosial Desa Bongas Kulon masyarakat yang mendapatkan bantuan memperoleh pengetahuan baru tentang menjaga kesehatan anak.

Pendidikan dapat mempercepat keberhasilan tujuan pemberdayaan. Dengan pendidikan, maka peningkatan kesadaran untuk mengembangkan potensi diri dan dapat melaksanakan perannya sebagai individu serta masyarakat memiliki peluang lebih besar. Oleh karena itu, pendidikan harus diperbaiki sebagai fasilitas yang dirasakan peserta Program Keluarga Harapan sehingga memiliki kemampuan untuk menerapkan keberadaan diri akan potensi untuk melangsungkan kehidupan di masa depan (Murniati, 2008:43).

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia erat kaitannya dengan pendidikan yang ditempuh mayoritas penduduk. Penduduk dengan perekonomian prasejahtera menempuh pendidikan yang rendah karena kurangnya biaya dalam menjangkau layanan pendidikan (Panjaitan, 2000:50). Sehingga membutuhkan bantuan luar untuk mengakses layanan pendidikan.

Perbaikan pendidikan memiliki urgensi penting dalam memberdayakan masyarakat. Dengan perbaikan pendidikan maka kualitas masyarakat juga dapat berkembang. Selain itu, dapat melahirkan semangat untuk memiliki kemauan terus belajar tanpa batasan apapun.

Hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon mayoritas dirasakan dampaknya dalam aspek pendidikan. Terdapat 166 keluarga penerima manfaat kategori pendidikan yang berasal dari SD, SMP, dan SMA/SMK. Dari jenjang pendidikan tersebut, saat ini rantai putus sekolah di Desa Bongas Kulon mengalami penurunan karena mendapatkan akses layanan pendidikan dari bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan.

Keluarga penerima manfaat Desa Bongas Kulon dalam komponen pendidikan mendapat peningkatan kualitas dan layanan pendidikan. Selain itu, dirasakan juga dampaknya oleh keluarga penerima manfaat adanya kemudahan dalam mengakses pendidikan, karena dana bantuan yang didapatkan digunakan sesuai dengan komponen yang diterima. Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat sudah mengalami perkembangan pola berpikir agar anaknya dapat menyelesaikan pendidikan formal sampai 12 tahun atau diharapkan dapat melanjutkan jenjang pendidikan sampai sarjana.

Pelaksanaan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi atau dinas sosial. Sistem pelaksanaannya yaitu bertahap, mulai dari pemerintah pusat, provinsi lalu

pemerintah kabupaten atau kota dan disalurkan oleh pendamping sosial kepada penerima manfaat. Pendamping sosial di Desa Bongas Kulon menyalurkan bantuan tersebut kepada beberapa kategori. Kategori kesejahteraan sosial lebih memberikan bantuan kepada lanjut usia yang kurang berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. hal tersebut dilakukan agar lansia tetap produktif berdasarkan kemampuannya sebagai usaha untuk mempertahankan hidup (Utomo, 2019:29).

Program yang diimplementasikan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon dirasakan manfaatnya oleh lansia untuk mencukupi kebutuhan dasar dan kesejahteraan hidup. Selain itu, lansia di Desa Bongas Kulon yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan mengalami peningkatan dalam mengakses layanan kesehatan.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada lansia yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kulon, adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan dan tercukupinya kebutuhan dasar hidup, seperti pemenuhan gizi dalam makanan, kesehatan, dan obat-obatan. Selain itu, terdapat lansia yang tinggal sendiri dan menanggung hidupnya hanya berdasarkan bantuan yang diterima. Lansia semacam ini, lebih mudah terkena penyakit dan rentan mengalami krisis ekonomi.

PENUTUP

Program Keluarga Harapan memiliki metode dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat yaitu dengan bimbingan program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan pencairan dana. Tujuan dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), agar adanya perubahan perilaku dan kemandirian keluarga yang mendapatkan bantuan. Selain itu, pencairan dana berbentuk bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat agar kebutuhan hidup tercukupi dan terciptanya keluarga yang sejahtera.

Implementasi Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon dalam memandirikan keluarga miskin yaitu dengan menerapkan tahap persiapan, implementasi program, evaluasi, dan terminasi. tahap persiapan berkaitan dengan penetapan calon keluarga yang akan mendapatkan manfaat. Tahap pelaksanaan program berbentuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan pendistribusian dana bantuan sosial. Tahap evaluasi sebagai tahap meninjau komitmen keluarga prasejahtera di Desa Bongas Kulon. Tahap terminasi, tahap pemutusan hubungan keluarga penerima manfaat. Tahap tersebut dilakukan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan dengan penerima manfaat serta aparat desa.

Hasil pemberdayaan keluarga prasejahtera di Desa Bongas Kulon ditinjau berdasarkan tercapainya tujuan pemberdayaan keluarga. Indikator keberhasilannya yaitu: (1) Aspek kesehatan anak usia dini terpenuhi, hal tersebut terbukti bahwa tidak adanya anak usia dini yang mendapatkan bantuan menderit stunting; (2) Aspek pendidikan terpenuhi yaitu seluruh anak dapat sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai menengah atas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat angka putus sekolah di Desa Bongas Kulon; (3) Kesejahteraan sosial bagi lansia terpenuhi ditinjau dari kebutuhan pangan dan kesehatan yang baik.

Sarannya bagi pendamping sosial Program Keluarga Harapan Desa Bongas Kulon, pelaksanaan program pemberdayaan keluarga penerima manfaat harus dilaksanakan secara optimal dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) diimplementasikan kembali agar edukasi kepada masyarakat tetap berlangsung. Selain itu, untuk keluarga prasejahtera Desa Bongas Kulon yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, dana bantuan harus dialokasikan untuk menunjang fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan harus dilaksanakan dengan baik karena hal tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M. O. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Ardian, I. (2014). *Pemberdayaan Keluarga (Family Empowerment) Sebagai Intervensi Keperawatan Keluarga*. *Jurnal Informasi Kimia dan Permodelan*. Vol 53 (9). Hlm. 7-10.
- Arfiani, D. (2019). *Berantas Kemiskinan*. Semarang: Alprin
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Hanafi R. (2018). *Ekonomi Lingkungan: Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Sekitar Hutan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Handono S Y., Hidayat K., Purnomo M. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: UB Press.
- Hidayatulloh M A., Adisti A R., Sriyanti L., Rafif A A., Pratama F I P., Sukmawaty W E P., Sumantri B A., Lamato R., Khasri M R K., Anhar P M A., Kartikasari M., Ananda S., Damayanti O A., Paramita W M. (2020). *Promoting Disability Right In Indonesia: Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*. Yogyakarta: PLD Press.
- Hoesada J. (2021). *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*.

- Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Horunni'mati S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Ekonomi. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN, Purwokerto.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Program Keluarga Harapan, diakses pada 7 Juli 2022 pukul 21.58 WIB, dari <http://kemensos.go.id/program-keluarga-harapanpkh#:~:text=Program%20Keluarga%20Harapan%20yang%20selanjutnya,sebagai%20keluarga%20penerima%20manfaat%20PKH>
- Lubis A R. (2021). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan: Studi Deskriptif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikas., UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Mardikanto T. & Poerwoko S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Maryani D. & Nainggolan R R E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mubasyaroh. (2017). Strategi Dakwah Persuasif dalam Mengubah Perilaku Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. Vol 11 (2). Hlm. 313.
- Murniati. (2008). Manajemen Statejik: Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Panjaitan M. (2000). Memberdayakan Kaum Miskin. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Permana A C., Sasmito C., Gunawan C I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 10 (2). Hlm. 64-74.
- Prahesti D D. & Putri P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. Vol 12 (1). Hlm. 142.
- Rachmat H H. (2018). Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roesmidi, & Risyanti, R. (2006). Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Sarpono. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sudarmanto E., Revida E., Zaman N. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Ulfa R F., RS Syamsuddin, Aliyudin. (2017). Pemberdayaan Anak Asuh Di Rumah Singgah Hidup Damai Cinta Indonesia Robbani. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol 2 (1). Hlm. 63.
- Utomo A S. (2019). *Status Kesehatan Lansia Berdayaguna*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Yulivan I. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

